

**PENGARUH *TAX AVOIDANCE* JANGKA PANJANG
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2012)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Ari Putra Permata Simarmata

NIM. 12030110141001

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ari Putra Permata Simarmata

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141001

Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi** (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2012)

Dosen Pembimbing : Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 7 Juni 2014

Dosen Pembimbing,

(Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 19810813 200801 2007

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ari Putra Permata Simarmata
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141001
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
Judul Skripsi : **Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi** (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2012)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Juni 2014

Tim Penguji :

1. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt. (.....)
3. Drs. M. Didik Ardiyanto, S.E, M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya , Ari Putra Permata Simarmata, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi** (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2012), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis lainnya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 7 Juni 2014

Yang membuat pernyataan,

Ari Putra Permata Simarmata

NIM : 12030110141001

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of long-run tax avoidance on firm's value with institutional ownership as moderating variable. Variables examined in this research consisted of tax avoidance which measured with cash effective tax rate (CashETR) and for the long-run tax avoidance calculated using cumulative 10 years, firm value as measured using Tobins'Q, and institutional ownership.

The sample which is used in this research was extracted with using purposive sampling method. After reduces with several criteria, 34 firms are determined as samples. The analysis technique in this study uses a linear regression analysis with help a program named SPSS version 20.

The test results showed that short-run tax avoidance effect on long-run tax avoidance, and institutional ownership effect on firm value. Meanwhile, long-run tax-avoidance does not significant effect on firm value and there is not any increase in firm value after a practice of long-run tax avoidance, also variable of institutional ownership can not strengthen the relationship between long-run tax avoidance on firm value.

Keyword : *tax avoidance, cash effective tax rate (Cash ETR), institutional ownership, and firm value.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang terhadap Nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari *Tax Avoidance* yang diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)* dan untuk jangka panjang dengan menggunakan perhitungan kumulative selama 10 tahun, nilai perusahaan yang diukur dengan perhitungan Tobins'Q, dan kepemilikan institusional.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Setelah pengurangan dengan beberapa kriteria, ditetapkan sebanyak 34 perusahaan sebagai sampel. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear dengan bantuan program bernama SPSS versi 20.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *tax avoidance* jangka pendek berpengaruh terhadap *tax avoidance* jangka panjang, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, *tax avoidance* jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan tidak terdapat peningkatan nilai perusahaan setelah adanya praktik *tax avoidance* jangka panjang, serta variabel kepemilikan institusional tidak dapat memperkuat hubungan antara *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci : *tax avoidance*, *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*, kepemilikan institusional, nilai perusahaan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang mahakudus
adalah pengertian”

(Amsal 9:10)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

(Filipi 4:6)

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

Kedua Orangtua yang luar biasa (Papa dan Mama)

Kakak Gladioulus dan Mutiara (Syum kiyup)

Kawan-kawan Akuntansi FEB Undip 2010

Serta keluarga PMK FEB Undip tercinta

Tuhan Selalu Bersama Kita

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas kasih karuniaNya dan penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2012)”** dengan lancar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak baik bimbingan, arahan, kritik, dorongan semangat, dan motivasi yang luar biasa. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs.H. M. Nasir, M.Si., Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Ibu Nur Cahyonowati, SE., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasinya dengan sangat sabar kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Marsono, SE., M.Adv. Acc., Akt., selaku dosen wali yang telah mengarahkan penulis selama menempuh studi Akuntansi di FEB Undip.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menumpuh studi.
6. Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah membantu penulis selama proses studi.
7. Keluarga tercinta (Papa, Mama, Ka Gladis, dan Ka Muti) yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kawan-kawan Akuntansi 2010 khususnya Akuntansi Reguler II yang telah menjadi teman yang luar biasa dan telah berbagi ilmu, semangat dan kebahagiaan selama menempuh studi.
9. Kapal Crew (Bos Latif, Prama, Rudy, mas Yos, Aldo, Tama, Raymond, Barru, Abi, Ary cumi) yang menjadi teman seperjuangan selama menempuh studi maupun saling mendukung dalam segala keadaan selama ini.
10. Teman-teman satu bimbingan Ibu Nur Cahyonowati (Nadia, Hana, Tiffani, Annisaul, Feby, Laras, Seno, Ina) yang selalu memberikan bantuan dan petunjuk kepada penulis.
11. Keluarga dalam satu kepengurusan PMK “KEJU RANGERS” (Mariati, Yosua Martin “Ucup”, Yonatan Pasaribu) yang luar biasa dan atas kebersamaannya selama ini dan semangatnya telah berbagi dan saling bertumbuh dalam pelayanan kepada penulis.

12. Seluruh keluarga besar PMK FEB Undip yang terkasih dan yang telah berbagi dan mendukung satu sama lain untuk dapat tumbuh bersama, khususnya kawan-kawan PMK 2010 (Adiel, Brilliant, Esy, Remy, Yosevine, Kikis, Enny, Milka, Gyna, Getha, Elma, Yosua, Gusrida, Olin, Agnes, Amos, Gunawan, Marcel, Lena, Alto, dan yang lainnya) yang telah memberikan semangat dan pelajaran yang berharga selama ini.
13. Keluarga KKN Rowosari, desa Bulak, Kendal (Raendi, Oment, Yohana, Mba Herning, Fitri, Santi) yang telah gila bareng selama KKN 2013.
14. Teman-teman Akuntansi kelas A Reguler II angkatan 2010 atas kekeluargaan dan kebersamaannya selama kuliah.
15. Anggota kosan Pak Sulaiman dan Wisma Vizanda atas kebersamaannya dan bantuannya selama ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan baik dan tulus memberikan doa dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga kekurangan yang ada dapat sebagai pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semarang, 7 Juni 2014

Penulis

(Ari Putra Permata Simarmata)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Sinyal (<i>Signalling Theory</i>).....	13
2.1.2 Pajak	14

2.1.2.1 Pengertian Pajak	14
2.1.2.2 Manajemen Pajak.....	16
2.1.2.3 <i>Tax Planning</i>	17
2.1.2.4 Penghindaran Pajak (<i>Tax Planning</i>)	19
2.1.2.4.1 <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>	23
2.1.2.4.2 <i>Long Run Cash ETR</i>	23
2.1.3 Nilai Perusahaan.....	24
2.1.4 <i>Corporate Governance</i>	28
2.1.4.1 Kepemilikan Institusional	30
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Pemikiran	34
2.4 Pengembangan Hipotesis	36
2.4.1 Pengaruh <i>tax avoidance</i> jangka pendek terhadap <i>tax avoidance</i> jangka panjang.....	36
2.4.2 Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan	37
2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan	40
2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Hubungan <i>Tax avoidance</i> Jangka Panjang dengan Nilai Perusahaan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	44

3.1.1 Variabel Dependen.....	44
3.1.2 Variabel Independen	46
3.1.2.1 <i>Tax Avoidance</i>	46
3.1.2.1.1 <i>Short-Run Tax Avoidance</i>	47
3.1.2.1.2 <i>Long-Run Tax Avoidance</i>	47
3.2.2 Kepemilikan Institusional.....	48
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	49
3.2.1 Populasi	49
3.2.2 Sampel Penelitian.....	49
3.3 Metode Analisis.....	50
3.3.1 Uji Statistik Deskriptif	50
3.3.2 Uji Asumsi Klasik	50
3.3.2.1 Uji Normalitas	51
3.3.2.2 Uji Multikolonieritas.....	52
3.3.2.3 Uji Autokorelasi.....	53
3.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas	54
3.3.3 Analisis Regresi.....	54
3.3.4 Pengujian Hipotesis.....	56
3.3.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	56
3.3.4.2 Uji Kofisien Determinasi (R^2).....	57
3.3.4.3 Uji t (parsial).....	58
3.3.4.4 Uji Chow Test	58

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	60
4.2 Analisis Data	61
4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	61
4.2.1.1 Statistik Deskriptif untuk <i>Cash ETR</i>	65
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	68
4.2.2.1 Uji Normalitas	68
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas	69
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	70
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	71
4.2.3 Analisis Model Regresi	73
4.3 Hasil Uji Model Hipotesis.....	75
4.3.1 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Simultan F)	75
4.3.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi	76
4.3.3 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Statistik t)	77
4.3.4 Hasil Uji Chow Test.....	79
4.4 Interpretasi Hasil	81
BAB V PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Keterbatasan Penelitian	89
5.3 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak.....	22
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Hasil Penentuan Sampel.....	61
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	62
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Normalitas (<i>One-Sample K-S</i>)	69
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas.....	70
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	71
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	72
Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis / Model Penelitian.....	73
Tabel 4.8 Hasil Uji Chow Test.....	79
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1 Grafik Histogram dari <i>Cash ETR</i>	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	: Daftar Perusahaan Sampel.....	96
Lampiran B	: Data <i>Cash ETR</i> , Kepemilikan Institusional, dan Tobins'Q.....	98
Lampiran C	: Hasil Uji Normalitas, Multikolinearitas, dan Heteroskedastisitas	102
Lampiran D	: Hasil Regresi	107

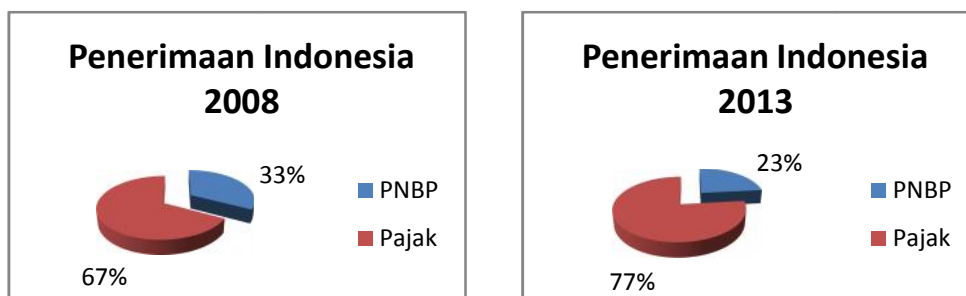
Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Oleh karena itu pendapatan dari dalam negeri dapat menjadi sumber utama penerimaan negara kita, yang salah satunya diperoleh dari sektor perpajakan. Hal tersebut memperjelas bagaimana pentingnya pajak bagi negara kita. Selain itu dalam APBN yang ditentukan setiap tahun, pajak terbukti memiliki pengaruh dalam penerimaan negara. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun yang memiliki tujuan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan di dalam negeri.

Berikut ini adalah komposisi penerimaan Indonesia tahun 2008 dan 2013 :



*sumber : bps.go.id

Dari gambar tersebut dapat kita tahu bahwa penerimaan Indonesia dari sektor pajak di tahun 2013 meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun 2008, hal ini menunjukkan penerimaan dari sektor pajak akan meningkat dari tahun ke

tahun. Untuk tahun 2014 ini pemerintah menargetkan untuk penerimaan dari sektor perpajakan sebesar 1.310,2 Trilyun Rupiah, meningkat 14,1% dari tahun 2013.

Perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara di bagian pajak ini disebut reformasi pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk dapat melakukan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Di sisi lain, pajak dalam perusahaan merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan, karena bagi perusahaan pajak akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diperoleh perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk membayarnya serendah mungkin. Adanya perbedaan pandangan antara perusahaan dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika memiliki beban pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan (Wulandari, dkk, 2004).

Untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak yang ada dalam perusahaan. Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2003), manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Bagi manajemen pada umumnya, perencanaan pajak bukan intuisi belaka karena didasarkan pada berbagai konsep dan tujuan yang jelas. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi beban atau pajak yang terutang baik dalam tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun berikutnya (Harnanto, 2013, p. 3). Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Pohan, 2013, p. 23). Namun di sisi lain kegiatan ini menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah kegiatan penghindaran pajak ini memiliki tujuan bisnis yang dapat dibenarkan oleh perpajakan? Maka dari itu, kegiatan penghindaran pajak ini dapat merugikan negara, karena aktivitas penghindaran pajak ini akan mengarah kepada penghindaran pajak yang terlalu agresif.

Menurut Dyreng et. al (2008), *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi

perusahaan. Hal ini disebabkan karena *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan.

Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam setiap periodenya, dimana dapat dilihat dari harga pasar sahamnya. Hal ini dikarenakan nilai perusahaan yang tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan kepada para pemegang saham, dan mereka akan menempatkan modalnya pada perusahaan tersebut. Peningkatan nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen, dimana suatu keputusan yang diambil akan mempengaruhi keputusan lainnya dan nantinya akan berdampak pada nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Salah satu keputusan manajemen tersebut adalah untuk dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Bagi investor sebagai *principal* yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut. Namun bagi pihak manajemen, aktivitas penghindaran pajak diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengurangi pajak perusahaan yang masih dalam peraturan-peraturan perpajakan yang ada sehingga nantinya akan menaikkan laba perusahaan dan akan berdampak terhadap nilai perusahaan tersebut yang dilihat dari harga pasar saham.

Dengan demikian, dalam memaksimalkan nilai perusahaan, manajemen dimungkinkan akan berhadapan dengan munculnya konflik *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, dimana masing-masing pihak hanya mementingkan pribadinya saja. Oleh sebab itu *good corporate governance* perlu diterapkan di perusahaan. Salah satu penerapan *good corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor manajemen, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dengan demikian, keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006), semakin besar kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu Shleifer dan Vishny (dalam Tendi Haruman, 2008) menyatakan bahwa jumlah pemegang saham yang besar (*large shareholders*) mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Para pemegang saham besar seperti kepemilikan oleh institusional akan dapat memonitor tim manajer secara lebih efektif dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya konsentrasi kepemilikan. Tingginya kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan

meminimalisasi tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, pemilik institusional akan berusaha melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai perusahaan miliknya. Hal ini konsisten dengan Lins (2002) yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan pada pihak luar perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2008), yang mengkaji tentang *tax avoidance* jangka panjang. Dyreng et. al menyatakan bahwa pengukuran *tax avoidance* yang tepat bagi perusahaan adalah secara jangka panjang (perhitungan kumulative selama 10 tahun). Perhitungan dalam jangka panjang diharapkan mampu menghapuskan *permanent difference* sehingga benar-benar mencerminkan perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Selain itu, bagaimana pengaruh dari *tax avoidance* jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan terhadap nilai perusahaan menjadi hal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian Desai dan Dhermapala (2009) serta Chasbiandani dan Martani (2012). Chasbiandani (2012) telah melakukan analisis regresi mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* jangka panjang dengan cara perhitungan yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007). Dalam penelitian ini, penulis menambahkan variabel moderasi *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional yang ditambahkan mengacu pada penelitian oleh Desai dan Dhermapala (2009) yang berjudul *Corporate Tax*

Avoidance and Firm Value. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur sesuai persentase kepemilikan saham oleh institusi perusahaan maupun pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi (pada perusahaan manufaktur yang terhadap di bursa efek Indonesia tahun 2011-2012).”**

1.2 Perumusan Masalah

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan berusaha untuk mencapai laba yang optimal demi kelangsungan perusahaan tersebut kedepannya. Oleh karena itu perusahaan seringkali menggunakan berbagai cara agar dapat meminimalkan beban pajaknya supaya tidak menurunkan laba perusahaan tersebut secara signifikan. Dalam rangka meminimalkan beban pajak tersebut, tidak jarang perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) perpajakan.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan akan mendapat pengaruh terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak tersebut diharapkan oleh para manajer dapat meningkatkan nilai perusahaan, dimana investor akan mengamati bagaimana nilai perusahaan melalui harga saham perusahaan dalam perdagangan di bursa. Nilai perusahaan menurut James Tobin (1967) dapat diukur menggunakan rasio Tobins'Q.

Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et. al (2008) mengukur bagaimana perhitungan *tax avoidance* jangka panjang dan juga menguji apakah *tax avoidance* jangka pendek berpengaruh terhadap *tax avoidance* jangka panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* jangka pendek yang diukur menggunakan *cash effective tax rate (CETR)* berpengaruh terhadap *tax avoidance* jangka panjang. Chasbiandani dan Martani (2012) juga melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* jangka panjang yang dihubungkan terhadap nilai perusahaan sebagai variabel dependen pada perusahaan di Indonesia, menemukan hasil serupa dengan Dyreng et. al (2008) yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) jangka pendek yang diukur menggunakan *cash effective tax rate (CETR)* berpengaruh terhadap *tax avoidance* jangka panjang yang diukur dengan perhitungan kumulative selama 10 tahun dari *cash effective tax rate*. Selain itu Chasbiandani dan Martani (2012) dalam penelitiannya juga mendapatkan bahwa *tax avoidance* jangka panjang yang diukur secara kumulative selama 10 tahun berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Wang (2010) dalam penelitiannya yang berjudul *Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value* menunjukkan hasil bahwa *tax avoidance* akan meningkatkan nilai perusahaan, terutama pada perusahaan yang memiliki transparansi perusahaan paling baik.

Namun Desai dan Dhermapala (2009) dan Chasbiandani (2012) dalam penelitiannya menemukan hasil yang tidak sejalan dengan uraian mengenai *tax avoidance* dan nilai perusahaan diatas. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa *tax avoidance* memiliki hubungan yang negatif terhadap nilai perusahaan. Desai dan Dhermapala (2009) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa

corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *tax avoidance* jangka pendek berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* jangka panjang?
2. Apakah *Tax avoidance* jangka panjang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah kepemilikan institusional dapat memperkuat hubungan antara *tax avoidance* jangka panjang dengan nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Pertama, penelitian ini akan menguji *tax avoidance* jangka pendek yang diukur menggunakan *cash effective tax rate (CETR)* berpengaruh terhadap *tax avoidance* jangka panjang. Setelah itu, akan menguji apakah *tax avoidance* jangka panjang tersebut (yang diukur kumulative selama 10 tahun) berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dari 2 tahun pengamatan saja yaitu tahun 2011 dan tahun 2012, serta apakah variabel *corporate governance* yang diproksikan oleh kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara variabel *tax avoidance* jangka panjang dan nilai perusahaan tersebut, khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membuktikan bahwa *tax avoidance* jangka pendek berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* jangka panjang
- 2a. Membuktikan bahwa *tax avoidance* jangka panjang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- 2b. Membuktikan bahwa nilai perusahaan mengalami peningkatan setelah adanya *tax avoidance* jangka panjang.
3. Membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
4. Membuktikan bahwa kepemilikan institusional dapat memperkuat hubungan *tax avoidance* jangka panjang dengan nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih memperhatikan keefektifan *corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan lebih transparan dan dapat diandalkan. Dengan laporan yang transparan dan dapat diandalkan maka hal tersebut akan menarik dan mempengaruhi investor dalam keputusan investasi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan dapat menghindari untuk

melakukan *tax avoidance* yang terlalu agresif yang diukur dengan penurunan nilai *cash effective tax rate (CETR)* secara signifikan.

2 Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan perusahaan atas *corporate governance* yang ada didalamnya dan aktivitas pengindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga pemerintah khususnya direktorat jendral pajak dapat mempertimbangkan untuk membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.

3 Bagi para akademisi dan peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai mengenai pengaruh dari *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan serta sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan penelitian lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini sistematika penulisan terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yaitu berdasarkan latar belakang yang ada timbul pertanyaan-pertanyaan peneliti yang nantinya akan

menjadi sebuah hipotesis, tujuan penelitian, ruang lingkup, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori yang berkaitan dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu, dan hipotesa yang dirumuskan untuk melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu penjelasan dari tiap-tiap variabel penelitian, populasi dan sampel dari penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi dekripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model regresi, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan berisi penyajian singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil dan saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling theory menurut Wolk dalam Thiono (2006 : 4), menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetris informasi (*asymmetri information*) antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan (*agent*) mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan (*principal*) dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Hal yang dapat terjadi atas asimetri informasi menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Arifin (2005) dapat menimbulkan 2 (dua) permasalahan, yaitu :

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebuah kelalaian dalam tugas.

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana sebuah perusahaan seharusnya memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut dapat berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh

manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Ratna dan Zuhrotun, 2006 dalam Jama'an, 2008).

Dengan adanya *signalling theory* ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak manajemen perusahaan terkhususnya perusahaan yang telah *go public* pasti memberikan informasi kepada para investor sehingga investor dapat mengetahui keadaan perusahaan dan prospeknya di masa depan. Oleh sebab itu dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi investor dapat membedakan perusahaan mana yang memiliki nilai perusahaan yang baik, sehingga di masa mendatang dapat memberikan keuntungan bagi investor tersebut (Alivia, 2013). Dalam *signalling theory*, pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (Jama'an, 2008). Selain itu bagi pihak manajemen, praktik penghindaran pajak yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pihak investor yang akan berdampak terhadap naiknya nilai perusahaan. Karena pada dasarnya nilai perusahaan dapat dikatakan baik salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan

bahwa, “*pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebarnya kemakmuran rakyat*”.

Prof. Dr. H. Rochman Soemitro SH. dalam buku manajemen pajak oleh Zain (2003) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian pengertian tersebut dikoreksi dan direvisi sendiri oleh Prof. Dr. H. Rochman Soemitro SH. menjadi, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, bila pemasukan pajak masih terdapat surplus maka akan digunakan membiayai *public investment*.

Terdapat dua fungsi utama dari pajak, yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan mengatur (*reguler*). *Budgeter* berarti pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan fungsi *reguler*, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2009).

2.1.2.2 Manajemen Pajak

Jika dilihat dari sisi negara, pajak merupakan bagian dari penerimaan negara, namun akan berbanding terbalik jika dilihat dari sisi perusahaan, dimana pajak bagi perusahaan merupakan biaya yang mengurangi laba. Oleh sebab itu, salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum dengan meminimalkan biaya dari aktivitas operasi perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba (Chairil Anwar, 2013, h. 3)

Pada dasarnya, tidak seorang pun wajib pajak baik orang pribadi maupun badan senang membayar pajak. Asumsi Leon Yudkin dalam Zain (2003) mempertegas hal tersebut :

- a. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu berusaha menghindari pajak terhutang secara ilegal. Upaya penghindaran ini dilakukan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai

alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta keyakinan bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Manajemen pajak merupakan cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperkecil biaya pajak. Menurut Chairil Anwar Pohan dalam bukunya manajemen perpajakan (2013), manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Selain itu Ia juga menyatakan bahwa diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia (manusiawi), “*Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar.*”

Fungsi manajemen pajak ada 3, yaitu:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*tax implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*tax control*)

2.1.2.3 Tax Planning

2.1.2.3.1 Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Tax Planning

Tax planning merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas serta tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan

meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena akan dikenai pajak. Kalau fenomena tersebut dikenakan pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. (Erly Suandy, 2008, h. 7)

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari *tax planning* adalah :

- Meminimalisasi beban pajak yang terutang
- Memaksimalkan laba setelah pajak
- Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- Menunda pengakuan penghasilan
- Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*
- Menghindari pengenaan pajak berganda
- Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
- Menghindari bentuk penghasilan yang membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Setelah kita mengetahui apa tujuan dari *tax planning* sebagaimana telah diungkapkan diatas, maka manfaat yang bisa diperoleh atas *tax planning* yang dilakukan secara cermat adalah :

- Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi,
- Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas

untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.1.2.3.2 Strategi *Tax Planning*

Beberapa strategi *tax planning* yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu :

- Penghematan pajak (*Tax Saving*)
- Penghindaran pajak (*Tax avoidance*)
- Penundaan pembayaran pajak
- Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
- Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindar lebih bayar
- Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.

2.1.2.4 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Menurut Dyreng, *et. al* (2008) *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.

Menurut komite fiskal OECD (Spitz, 1983), terdapat tiga karakter dari *tax avoidance* yaitu :

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak

2. Seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya,
3. Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.

Skema penghindaran pajak di berbagai negara menurut Darussalam (2009) dalam www.ortax.org dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*),
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang ketiganya bertujuan untuk meminimalkan beban pajak (Zain, 2003).

Secara teori, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan individual ditentukan oleh tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, pinalti, dan *risk-aversion* (Allingham dan Sandmo, 1972 dalam Hanlon dan Heitzman, 2010). Menurut Slemrod (2004) dalam Hanlon dan Heitzman (2010), tambahan faktor untuk perusahaan dalam mematuhi pajak yaitu terpisahnya kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Hal tersebut dapat

menyebabkan keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan kepentingan manajemen. Inilah yang menyebabkan adanya penghindaran pajak perusahaan.

Slemrod (2004), Chen dan Chu (2005), serta Crocker dan Slemrod (2005) menjelaskan bahwa dasar untuk memahami penghindaran pajak adalah *agency framework*. Penghindaran pajak dianggap sebagai aktivitas yang mentransfer kesejahteraan dari negara ke pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2009). Menurutnya, aktivitas penghindaran pajak akan menimbulkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang ada dalam perusahaan atau bahkan menyesatkan investor.

Dalam literatur keagenan, penghindaran pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk memanipulasi laporan yang tidak sesuai. Dimana aktivitas ini memunculkan kesempatan bagi manajemen untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor. Manajer dapat membenarkan aktivitas ini dengan mengatakan ketidaktahuan dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas penghindaran pajak oleh pemeriksa pajak atau fiskus (Martani dan Chasbiandani, 2011).

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), dimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earning over n years
ETR differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression : $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The total difference between book and taxable income
Temporary BTD	Deffered tax expense / U.S STR	The total difference between book and taxable income
Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTD} / \text{TA}_{it} = \text{TA}_{it} + m_i$	A measure of unexplained total book-tax differences
Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN 48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data
Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010)

2.1.2.4.1 Cash Effective Tax Rate (CETR)

Untuk mengukur *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *Cash ETR* seperti yang telah dijelaskan dalam tabel 2.1 diatas. *Cash ETR* tahunan merupakan cara untuk mengukur *tax avoidance* jangka pendek. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, et. al (2008) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model *GAAP ETR*.

Permasalahan atau keterbatasan yang muncul dari penghitungan berdasarkan model *GAAP ETR* tersebut antara lain :

- a. *GAAP ETR* hanya berdasarkan pada data 1 periode, dimana ada kemungkinan terjadi variasi dalam *ETR* tahunan. Hal tersebut dapat menyebabkan kebiasaan dalam perhitungan dan perilaku *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.
- b. *Tax Expense* merupakan jumlah dari beban pajak tangguhan yang menggambarkan jumlah pajak yang akan datang sebagai konsekuensi atas adanya *temporary different*. Oleh sebab itu, *GAAP ETR* tidak dapat mencerminkan *tax avoidance* perusahaan.

2.1.2.4.2 Long-Run Cash ETR

Long Run Cash ETR adalah pengukuran *tax avoidance* dalam jangka panjang yang merupakan pengembangan dari pengukuran dengan *Cash ETR*.

Pengukuran ini merupakan model yang dikembangkan oleh Dyreng, *et al.* (2008), dan menjadi jawaban atas keterbatasan GAAP ETR dalam menghitung *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Martani dan Chasbiandani, 2012).

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dyreng, *et. al* (2008) mengembangkan pengukuran *Tax Avoidance* dengan menggunakan ukuran *long run cash ETR*. Pengukuran ini dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang, misalnya 10 tahun. Cara yang digunakan adalah dengan menjumlahkan *total cash tax paid* dalam waktu 10 tahun, kemudian dibagi dengan total *pre tax income* (yang sudah dikurangi dengan *special item*) dalam jangka waktu yang sama, dengan demikian pengukuran tersebut dapat menggambarkan kondisi ETR yang lebih mendekati biaya pajak perusahaan dalam jangka panjang.

2.1.3 Nilai Perusahaan

Tujuan jangka panjang dari perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Kenaikan nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan berupaya untuk bekerja lebih keras dengan menggunakan berbagai intensif untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara mendorong manajer.

Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham (Sari, 2010). Bagi perusahaan yang telah *go public* maka nilai pasar wajar perusahaan ditentukan mekanisme permintaan dan penawaran di bursa, yang tercermin dalam *listing price*. Harga pasar merupakan gambaran berbagai keputusan dan kebijakan

manajemen. Namun untuk nilai perusahaan yang belum *go public* nilainya terealisasi apabila perusahaan akan dijual (total aktiva dan prospek perusahaan, risiko usaha, lingkungan usaha, dan lain-lain (Margaretha, <http://books.google.co.id>).

Terdapat beberapa konsep dasar dalam penilaian perusahaan, yaitu : nilai ditentukan untuk suatu waktu ada periode tertentu; nilai harus ditentukan pada harga yang wajar; penilaian tidak dipengaruhi oleh kelompok pembeli tertentu. Suharli (2006) dalam Kusmadilaga (2010) dalam penelitiannya menyebutkan metode dan teknik dalam penilaian perusahaan yang mana sudah banyak dikembangkan oleh peneliti lainnya, yaitu :

- a. Pendekatan laba antara lain metode rasio tingkat laba atau price earning ratio, metode kapitalisasi proyek laba,
- b. Pendekatan arus kas antara lain metode diskonto arus kas,
- c. Pendekatan dividen antara lain metode pertumbuhan dividen,
- d. Pendekatan aktiva antara lain metode penilaian aktiva,
- e. Pendekatan harga saham, dan
- f. Pendekatan *economic added value*

Dalam penelitian ini metode dan teknik yang digunakan untuk menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin (1967) dan dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik, karena rasio ini dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam kegiatan perusahaan seperti terjadinya perbedaan *crosssectional* dalam pengambilan keputusan investasi. Rasio ini dinilai dapat memberikan informasi

yang paling baik, karena dapat menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan seperti terjadinya perbedaan *crosssectional* dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi, hubungan antar kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan (Sukamulja, 2004).

Brealy dan Myers (2000) dalam Sukamulja (2004) menyebutkan bahwa perusahaan dengan nilai Q yang tinggi biasanya memiliki *brand image* perusahaan yang sangat kuat, namun pada perusahaan dengan nilai Q yang rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil.

Menurut James Tobin dalam Sukamulja (2004), secara umum rasio Tobin's Q hampir sama dengan *market-to-book-value ratio*, namun rasio ini mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda antara lain :

1. *Replacement Cost vs Book Value*

Tobin's Q menggunakan (*estimated*) *replacement cost* sebagai denominator, sedangkan *market-to-book-ratio* menggunakan *book value of total equity*. Penggunaan *replacement cost* membuat nilai yang digunakan untuk menentukan Tobin's Q memasukkan berbagai faktor, sehingga nilai yang digunakan mencerminkan nilai pasar dari aset yang sebenarnya di masa kini, salah satu faktor tersebut misalnya inflasi. Sistem pelaporan akuntansi di Indonesia menganut metode *historical cost*, maka nilai yang tercantum pada neraca tidak dapat menunjukkan nilai aset yang sebenarnya pada saat ini. Hal ini membuat perhitungan Tobin's Q menjadi lebih valid. Meskipun demikian,

proses perhitungan untuk menentukan *replacement cost* merupakan suatu proses yang panjang dan rumit, sehingga beberapa peneliti seperti Black *et al.* (2003), menggunakan *book value of total assets* sebagai pendekatan terhadap *replacement cost*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan nilai *replacement cost* dengan nilai *book value of total assets* tidak signifikan sehingga kedua variabel tersebut dapat saling menggantikan.

2. *Total Assets vs Total Equity*

Market-to-book-value hanya menggunakan faktor ekuitas (saham biasa dan saham preferen) dalam pengukuran. Penggunaan faktor ekuitas ini menunjukkan bahwa *market-to-book-ratio* hanya memperhatikan satu tipe investor saja, yaitu investor dalam bentuk saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Tobin's Q memberikan wawasan yang lebih luas terhadap pengertian investor. Perusahaan sebagai entitas ekonomi, tidak hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai kegiatan operasionalnya, namun juga dari sumber lain seperti hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu penilaian yang dibutuhkan perusahaan tidak hanya dari investor ekuitas saja, tetapi juga dari kreditor. Semakin besar pinjaman yang diberikan oleh kreditor, menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan yang diberikan ini menunjukkan perusahaan memiliki nilai dasar yang lebih besar lagi. Dengan dasar tersebut, Tobin's Q menggunakan *market value of total assets*.

Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena dapat menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian setiap dana yang diinvestasikan (Herawaty, 2008). Dimana semakin besar nilai Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. (Sukamulja, 2004). Pernyataan tersebut dengan menggunakan rasio, yaitu jika rasio-Q diatas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi sehingga akan menarik munculnya investasi baru, sedangkan jika rasio-Q dibawah satu menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva tidak menarik investor untuk memberikan investasinya yang baru.

2.1.4 Corporate Governance

Organization of Economic Coperation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”

Dari definisi yang dijelaskan OECD dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah sebuah sistem yang mengarahkan dan mengawasi perusahaan. Struktur *corporate governance* menjelaskan bagaimana aturan prosedur dalam pengambilan keputusan sehingga tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

Isgiyarta dan Triatiarini (2005) mendefinisikan *corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Dalam pedoman umum GCG di Indonesia yang disusun berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat lima unsur dalam *corporate governance*, yaitu *transparency*, *accountability*, *reliability*, *independency*, dan *fairness* (TARIF). Unsur-unsur ini diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya konflik keagenan.

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Siswantaya (2007) mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. *Internal mechanism* (mekanisme internal), seperti struktur dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif.
2. *External mechanism* (mekanisme eksternal), seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan dengan hutang.

2.1.4.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer (Jansen dan Meckling, 1976).

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun (Wahyudi & Pawestri, 2006). Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud *blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5 % yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholders* dengan kepemilikan saham diatas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham dibawah 5%.

Komunitas bisnis dalam perusahaan menaruh perhatian yang besar untuk meningkatkan kepemilikan institusional, sehingga dapat lebih banyak mempengaruhi kebijakan perusahaan. Hal tersebut berdampak dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi, maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Shleifer and Vishny (dalam Barnea dan Rubin, 2005), menyatakan bahwa kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih berhati-

hati ketika mengambil keputusan yang oportunistis. Penelitian yang dilakukan oleh Wening (2009) juga menyatakan semakin besar kepemilikan yang dimiliki oleh institusional maka semakin besar juga pengaruh dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Penelitian Smith (1996) dalam Suranta dan Midiastuty (2004) menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan yang dilakukan institusi mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan serta dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Hal ini didukung oleh Cruthley et al., dalam Suranta dan Midiastuty (2004) yang mengemukakan bahwa pengawasan yang dilakukan institusi mampu mensubstitusi biaya keagenan lain, sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Scott D. Dyreng, Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew (2008)	Long-Run Corporate Tax Avoidance	Short Run tax avoidance berpengaruh positif terhadap long run tax avoidance.

2.	Mihir A Desai dan Dhammika Dharmapala (2009)	Corporate Tax Avoidance and Firm Value	Hubungan antara tax avoidance dengan nilai perusahaan positif dan tidak signifikan.
3	Tryas Chasbiandani dan Dwi Martani (2012)	Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan	Short Run tax avoidance berpengaruh positif terhadap long run tax avoidance. Dan long run tax avoidance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan short run tax avoidance tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan.
4	Xiaohang (Tina) Wang (2010)	Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value	Perusahaan yang memiliki transparansi yang baik akan lebih melakukan penghindaran pajak. Dan tax avoidance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, terutama pada perusahaan yang transparansinya baik.
5	Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2012)	Corporate Governance terhadap tax avoidance	Elemen corporate governance yang terdiri dari kualitas audit dan komite audit secara

			signifikan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak sedangkan untuk kepemilikan institusional dan dewan komisaris tidak mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak.
6	Frysa Praditha Purwaningtyas (2011)	Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan (2011)	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
7	Siallagan dan Machfoedz (2006)	Hubungan antara mekanisme corporate governance, kualitas laba dan nilai perusahaan	Penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit dan auditor mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial maka nilai perusahaan semakin rendah, dewan komisaris

			dan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan serta KAP yang tergabung dalam BIG Two akan meningkatkan nilai perusahaan.
--	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menggunakan perhitungan *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur dengan rentan waktu jangka pendek (*annual*) dan jangka panjang (perhitungan kumulatif 10 tahun). Peneliti ingin melihat apakah terdapat hubungan antara *tax avoidance* dalam jangka panjang terhadap *tax avoidance* jangka pendek (tahunan).

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan seharusnya dapat meningkatkan nilai dari pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2009). Nilai perusahaan yang diukur dengan rasio Tobin's Q ini menggambarkan nilai pasar perusahaan tersebut, karena salah satunya dilihat dari harga pasar saham perusahaan. Dengan adanya praktik *tax avoidance* jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan, apakah akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan tersebut, hal tersebut juga akan dilihat dalam penelitian ini. Selain itu apakah nilai perusahaan setelah adanya praktik *tax avoidance* jangka panjang

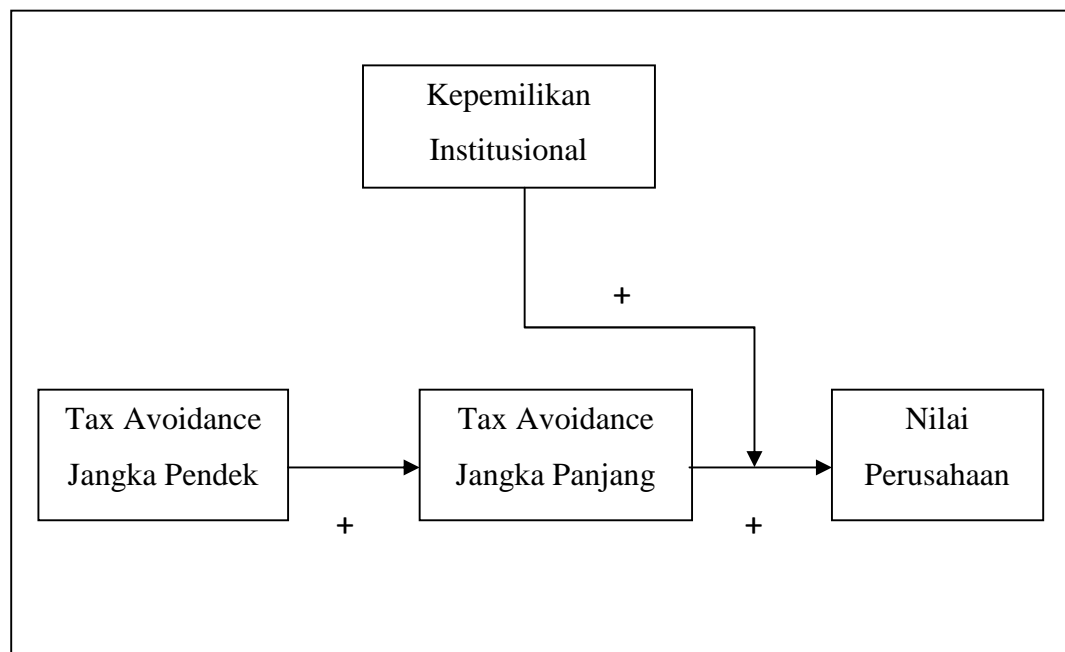
tersebut akan mengalami kenaikan atau penurunan pada periode tahun 2011 dengan tahun 2012.

Variabel kepemilikan institusional dalam penelitian ini akan dilihat apakah memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu, peneliti ingin melihat apakah variabel kepemilikan institusional ini dapat memperkuat hubungan antara *tax avoidance* jangka panjang dengan nilai perusahaan.

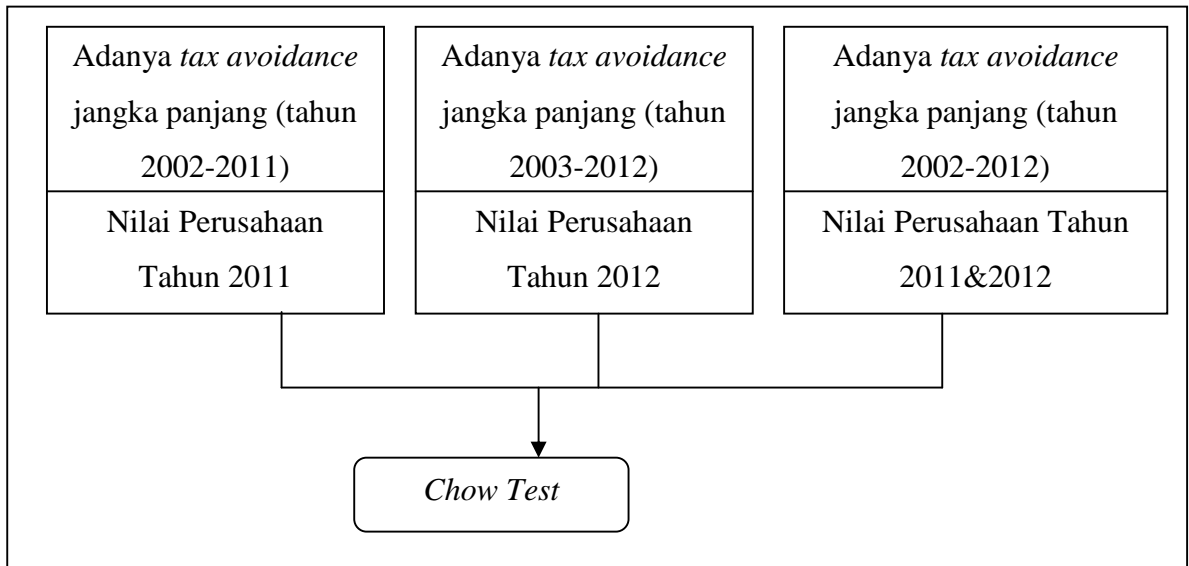
Berdasarkan keterangan diatas, maka kerangka pemikiran teoritis penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Pengaruh Tax Avoidance jangka panjang terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel pemoderasi



Pengaruh adanya praktik *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan tahun 2011 dan tahun 2012



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *tax avoidance* jangka pendek terhadap *tax avoidance* jangka panjang

Dyreng, et.al (2008) melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* namun dengan pengukuran jangka panjang (10 tahun). Penggunaan periode waktu yang panjang ini dianggap mampu menggambarkan keseluruhan aktivitas perencanaan pajak perusahaan, yang menunjukkan keseluruhan unsur dari *tax avoidance*. Penggunaan periode waktu yang panjang juga dapat digunakan untuk menguji apakah perusahaan mampu melakukan *tax avoidance* dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus, serta keterkaitan *tax avoidance* tahunan dengan *tax avoidance* jangka panjang (Chasbiandani dan Martani, 2012). Penghindaran pajak jangka pendek yang diukur dengan *Cash ETR* tahunan tidak

dapat menggambarkan dan memprediksi atas penghindaran pajak jangka panjang, karena bukan merupakan prediktor yang baik (Dyrenge et. al, 2008). Oleh sebab itu, penulis ingin melihat apakah terdapat hubungan antara *Cash ETR* jangka pendek dengan *Cash ETR* jangka panjang yang diukur secara kumulatif 10 tahun. Dyrenge, et. al (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara *Cash ETR* tahunan dengan pengukuran *Cash ETR* jangka panjang. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini :

H1: *tax avoidance* jangka pendek berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* jangka panjang.

2.4.2 Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan

Para pemegang saham menginginkan supaya perusahaan memiliki nilai perusahaan yang maksimal. Investor akan cenderung menanamkan modalnya dengan melihat laba bersih perusahaan yang akan menggambarkan nilai perusahaan itu sendiri, sehingga manajer secara tidak langsung dituntut bagaimana untuk memaksimalkan nilai perusahaan tersebut salah satu caranya dengan melakukan penghindaran pajak. Desai dan Dharmapala (2009) mengatakan sudut pandang tradisional terhadap penghindaran pajak perusahaan menunjukkan bahwa nilai pemegang saham seharusnya meningkat seiring dengan aktifitas penghindaran pajak perusahaan, namun hal itu berbeda bila dilihat dari sudut pandang manajer perusahaan terhadap penghindaran pajak,

dimana perusahaan akan memberikan prediksi yang berbeda. Perspektif manajer atas penghindaran pajak mengatakan penghindaran pajak tidak selalu diinginkan oleh pemegang saham karena terdapat biaya yang harus dikeluarkan di waktu yang akan datang, seperti biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan pajak, tambahan biaya kepatuhan (Wang, 2010).

Dalam penelitian Desai dan Dharmapala (2009), pengaruh aktivitas penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional yang lebih kuat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Wang (2010) juga membuktikan transparansi perusahaan berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa *tax avoidance* mempengaruhi nilai perusahaan, terutama untuk perusahaan yang transparansinya baik.

Hanlon dan Slemrod (2009) dalam penelitiannya menguji bagaimana reaksi pasar atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, menunjukkan bahwa tindakan *tax aggressiveness* dapat meningkatkan atau menurunkan nilai saham perusahaan. Jika *tax aggressiveness* dipandang sebagai upaya untuk melakukan *tax planning* dan efisiensi pajak, maka pengaruhnya positif terhadap nilai perusahaan. Namun jika dipandang sebagai tindakan *non compliance*, hal tersebut akan meningkatkan risiko sehingga mengurangi nilai perusahaan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pasar bereaksi negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Perusahaan dengan pengungkapan pajak yang lebih luas mendapatkan reaksi yang lebih baik. Ketika perusahaan tersebut memiliki *good corporate governance* yang lebih baik maka reaksinya akan

menjadi lebih positif. Perusahaan yang lebih berorientasi pada konsumen reaksinya lebih negatif dan reaksi tersebut tergantung pada persepsi investor atas level penghindaran pajak perusahaan.

Chasbiandani dan Martani (2012), menyebutkan bahwa pemegang saham, sebagai pengawas menyetujui tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dan manfaat yang akan diterima atas imbal jasa aktivitas tersebut lebih tinggi dibanding dengan biaya yang akan dikeluarkan. Di Indonesia, penegakan hukum dan kedisiplinan penerapan peraturan masih rendah, sehingga *tax avoidance* lebih dipandang sebagai benefit bukan risiko, karena risiko deteksi yang dapat diminimalkan, serta penghindaran pajak merupakan strategi manajemen pajak yang baik untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh *tax avoidance* jangka panjang (yang diukur kumulative selama 10 tahun) terhadap nilai perusahaan di tahun kesepuluh. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah praktik penghindaran pajak tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

H2a : Tax avoidance Jangka Panjang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Desai dan Dharmapala (2009) menyatakan bahwa dampak langsung dari adanya *tax avoidance* adalah untuk meningkatkan nilai dari perusahaan setelah pajak, khususnya pada beberapa perusahaan dengan manajemen yang kurang baik.

Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat apakah terdapat peningkatan nilai perusahaan dengan adanya *tax avoidance* jangka panjang dengan hipotesis sebagai berikut :

H2b : Nilai Perusahaan pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 setelah adanya praktik *tax avoidance* jangka panjang.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

Pada umumnya investor institusional merupakan pemegang saham yang cukup besar dan sekaligus memiliki pendanaan yang besar. Ada pendapat yang beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki pendanaan besar, maka kecil kemungkinan berisiko mengalami kebangkrutan. Sehingga keberadaannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Investor institusional sebagai pemilik mayoritas sangat berkepentingan untuk membangun perusahaan. Komitmen pemegang saham mayoritas untuk meningkatkan nilai perusahaan yang juga nilai pemegang saham ini sangat kuat karena apabila pemegang saham mayoritas melakukan likuidasi saham pada saat dia memegang saham dalam jumlah besar, maka para pemegang saham minoritas dan pasar saham akan mendiskon harga pasar saham perusahaan tersebut, sehingga akan merugikan pemegang saham mayoritas itu sendiri. Ada anggapan bahwa pemilik mayoritas memiliki pendanaan yang sangat kuat sehingga aman bagi pemegang saham maupun calon investor jika membeli saham perusahaan tersebut. Dengan demikian konsentrasi kepemilikan institusional akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan

berupa meningkatnya volume perdagangan saham dan harga saham sehingga akan meningkatkan nilai pemegang saham. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen dan nilai perusahaan (Haruman, 2007).

Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated investor*) dan lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibandingkan dengan investor non institusional. Investor institusional yang dianggap sebagai *sophisticated investor* memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan secara efektif, sehingga dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Fuerst dan Kang (2000) dalam Wahyudi dan Pawestri (2006) menemukan hubungan yang positif antara kepemilikan institusional dengan nilai pasar setelah mengendalikan kinerja perusahaan. Nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Hubungan Tax avoidance Jangka Panjang dengan Nilai Perusahaan

Perusahaan merupakan salah satu dari wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dan membayar pajaknya setiap tahun, sehingga *corporate governance* harus memutuskan orang yang terlibat dalam kontrak yang harus mengurus kewajiban perusahaan dalam membayar pajak perusahaan tersebut. Hal ini diperkuat dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa (2011) yang menyatakan bahwa besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan karena semata-mata memang memanfaatkan peraturan yang ada dan untuk kondisi tertentu saja tetapi bisa juga dilakukan untuk tujuan bisnis. Fungsi *corporate governance* dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh *investor* institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Lim (2011) dalam Hanum

(2013) juga menjelaskan bahwa peningkatan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham (beban pajak yang lebih rendah) dapat dipengaruhi oleh aktivitas pemegang saham melalui keterlibatan yang lebih besar dari investor institusi, dimana para pemegang saham yang kepemilikannya lebih besar dari pemegang saham institusi akan melakukan pembatasan terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak dan meningkatkan kekayaan dirinya sendiri. Namun di lihat dari pandangan yang berbeda, tindakan manajemen untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak berdasarkan monitoring dari institusi akan dapat meningkatkan nilai perusahaan, akan tetapi laporan keuangan yang dihasilkan dapat menyesatkan investor karena tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H4 : Kepemilikan Institusional memperkuat hubungan antara tax avoidance jangka panjang dengan nilai Perusahaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran (Sekaran, 2003). Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel terikat (dependen), variabel bebas (independen), variabel pemoderasi.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Nilai perusahaan. Pada umumnya, perusahaan dalam kegiatan operasinya memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut yang dapat dilihat dari harga sahamnya. (Fama, 1978 dalam Wahyudi dan Pawestri, 2006). Oleh sebab itu, nilai perusahaan dapat dikatakan sebagai cerminan dari kesejahteraan para pemegang saham. Semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin sejahtera pemilik saham perusahaan tersebut.

Ketika menghitung nilai perusahaan, manajer akan lebih tertarik pada nilai pasar perusahaan. Hal ini dikarenakan rasio nilai pasar perusahaan memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan di masa lampau dan prospeknya di masa yang akan datang. Salah satu rasio yang dinilai dapat memberikan informasi paling baik adalah Tobin's Q, karena rasio ini dapat menjelaskan berbagai fenomena

dalam kegiatan perusahaan, misalnya terjadi perbedaan *crosssectional* dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi, hubungan antara kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan, hubungan antara kinerja manajemen dengan keuntungan dalam akuisisi, dan kebijakan pendanaan, dividen, dan kompensasi (Sukamulja, 2004).

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan pengukuran dengan rasio Tobin's Q yang dinilai dari perhitungan selama 2 periode pengamatan yaitu tahun 2011 dan 2012. Periode pengamatan tahun 2011 dan tahun 2012 dilakukan untuk melihat bagaimana reaksi atas aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) jangka panjang dengan nilai perusahaan pada tahun kesepuluh. Tobin's Q dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Q_{it} = \frac{MVE_{it} + D_{it}}{BVE_{it} + D_{it}}$$

Keterangan :

Q_{it} = Nilai perusahaan pada tahun t

MVE_{it} = Nilai pasar ekuitas (*Equity Market Value*) perusahaan i pada tahun t, yang diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan (*closing price*) akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun.

BVE_{it} = Nilai buku dari ekuitas (*Equity Book Value*) perusahaan i pada tahun t, diperoleh dari selisih total aset perusahaan dengan total kewajiban

D_{it} = Nilai buku dari total hutang pada perusahaan i tahun t

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel independen adalah :

- a) *Tax avoidance*
- b) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional selain sebagai variabel independen, juga digunakan sebagai variabel pemoderasi dengan *tax avoidance*.

3.1.2.1 *Tax avoidance*

Tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan perhitungan *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*. *Cash ETR* adalah model yang dikembangkan oleh Dyreng et. al. (2008), yaitu sebagai berikut :

$$\text{CASH ETR}_{it} = \frac{\sum_{t=1}^N \text{Cash Tax Paid } it}{\sum_{t=1}^N (\text{Pretax Income } it)}$$

Cash effective tax rate dapat ditemukan dalam laporan keuangan sebagai pengungkapan tambahan pada bagian laporan arus kas atau dalam catatan atas laporan keuangan. Pengukuran dengan *Cash ETR* dalam penelitian ini dengan melihat perhitungan dalam jangka pendek (*Cash ETR* tahunan) dan dalam jangka panjang (*long-run Cash ETR*) yang merupakan pengembangan yang dilakukan oleh Dyreng et. al. (2008)

3.1.2.1.1 Short-Run Tax Avoidance (Tax Avoidance Jangka Pendek)

Tax Avoidance jangka pendek dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Cash ETR* (*CETR*) secara tahunan, yang dirumuskan seperti dibawah ini:

$$\text{CASH ETR}_{it} = \frac{\sum_{t=1}^N \text{Cash Tax Paid } it}{\sum_{t=1}^N (\text{Pretax Income } it)}$$

Dalam perhitungan *Cash ETR* ini, penulis tidak menggunakan pengurangan *special item* seperti yang dilakukan oleh Dyreng, et. al, 2008.

Keterangan :

- Cash ETR_{it}* : Pengukuran *tax avoidance* perusahaan pada tahun t
- Cash Tax Paid_{it}* : Pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun t
(terdapat dalam laporan arus kas perusahaan)
- Pretax Income_{it}* : Laba perusahaan sebelum pajak pada tahun t (hanya perusahaan yang mempunyai laba sebelum pajak positif)

3.1.2.1.2 Long-Run Tax Avoidance (Tax avoidance Jangka Panjang)

Perhitungan *tax avoidance* jangka panjang ini sesuai dengan model yang dikembangkan oleh Dyreng et. al (2008) yaitu dengan menjumlahkan *total cash tax paid* dalam waktu 10 tahun, kemudian dibagi dengan *total pretax income* dalam jangka waktu yang sama.

$$\text{Long-Run CASH ETR}_{it} = \frac{\sum_{t=10}^N \text{Cash Tax Paid } it-10}{\sum_{t=10}^N (\text{Pretax Income } it-10)}$$

Keterangan :

- Long-Run Cash ETR_{it}* : Perhitungan kumulatif 10 tahun untuk *Cash ETR*.

- Cash Tax Paid_{t-10}* : Pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun t-10 sampai tahun t (terdapat dalam laporan arus kas perusahaan).
- Pretax Income_{it-10}* : Laba perusahaan sebelum pajak pada tahun t-10 sampai tahun t (hanya perusahaan yang mempunyai laba sebelum pajak positif).

3.1.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusi. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Seperti halnya dengan nilai perusahaan, variabel kepemilikan institusional ini diukur selama dua (2) periode pengamatan yaitu tahun 2011 dan tahun 2012. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar, dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusi} = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2002-2012. Untuk mendapatkan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* digunakan perhitungan dari tahun 2002-2012, sedangkan untuk mendapatkan perhitungan variabel nilai perusahaan dan kepemilikan institusional, penulis menggunakan perhitungan hanya periode tahun 2011 dan 2012.

3.2.2 Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik non random sampling yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Salah satu teknik pengambilan sampling yang termasuk dalam teknik non sampling adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, dimana terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh sampel (Sugiyono, 2004).

Kriteria yang diharapkan oleh peneliti untuk sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2002 sampai dengan periode 2012,
- Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dan annual report selama periode pengamatan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2012,

- Perusahaan dengan *pre-tax income* yang selalu positif selama 10 tahun berturut-turut.
- Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah,
- Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember.

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *median*, *modus*, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2012). Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel – variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS 20.

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model pada penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung *multikolonieritas* dan *heteroskedastisitas*. Untuk itu sebelum

melakukan pengujian regresi linier berganda perlu lebih dahulu pengujian asumsi klasik yang terdiri dari:

3.3.2.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak (Gujarati, 2003). Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, *ploting* dan *residual* yang akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2012)

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data *residual* terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2012).

3.3.2.2. Uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Selanjutnya, jika variabel ini tidak saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2012)

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* digunakan untuk mengukur variabilitas independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $<0,10$ atau sama dengan $VIF >10$ (Ghozali, 2012).

3.3.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem autokorelasi*. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena *residual* (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2012).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan Uji *Durbin-Watson (DW test)*. Uji *Durbin Watson* digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* diantara variabel independen (Ghozali, 2012).

Hipotesis yang akan diuji adalah :

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r=0$)

H_1 : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tolak	$d_u < d < 4 - d_u$

3.3.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2012).

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2006). Selain itu pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *glejser* yaitu meregresikan absolut nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen, jika probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2012).

3.3.3 Analisis Regresi

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen/bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (Ghozali, 2012).

Dalam penelitian ini analisis regresi linier digunakan untuk memprediksi hubungan antara karakteristik *corporate governance* dan *effective tax rate* (ETR).

Terdapat 3 model regresi dalam penelitian ini, yaitu :

Model 1 : Model ini digunakan untuk menguji Hipotesis 1 yaitu menguji pengaruh *tax avoidance* jangka pendek terhadap *tax avoidance* jangka panjang

$$LRTA_{it} = \alpha + SRTA_{it} +$$

Keterangan :

$LRTA_{it}$ = *tax avoidance* jangka panjang yang diukur kumulatif selama 10 tahun

$SRTA_{it}$ = *tax avoidance* jangka pendek yang diukur pada tahun ke-10

Model 2 : Model ini digunakan untuk menguji hipotesis H2 dan H3, yaitu :

- H2 Menguji pengaruh variabel *Long Run Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan tanpa variabel moderasi
- H3 Menguji pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap Nilai perusahaan

$$\text{Tobin's } Q_{it} = \alpha + \beta_1 LRTA_{it} + \beta_2 INST_{it} +$$

Model 3 : Model ini untuk menguji hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dalam hubungan tersebut terdapat faktor yang memperkuat atau memperlemah (variabel moderasi). Model ini digunakan untuk menguji hipotesis 4 (H4) yaitu apakah variabel kepemilikan institusional dapat memperkuat

hubungan antara *tax avoidance* jangka panjang dengan nilai perusahaan.

$$\text{Tobin's } Q_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LRTA}_{it} + \beta_2 \text{INST}_{it} + \beta_3 \text{INST} * \text{LRTA}_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Tobin's Q_{it} : Nilai Perusahaan i pada tahun t

SRTA_{it} : *Tax avoidance* jangka pendek perusahaan i yang diukur pada tahun ke-10

LRTA_{it} : *Tax avoidance* jangka panjang perusahaan i yang diukur secara kumulatif selama 10 tahun

INST_{it} : Kepemilikan Institusional perusahaan i pada tahun t

ϵ_{it} : *error*

3.3.4 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Secara statistik, setidaknya *goodness of fit* dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai uji statistik F dan nilai uji statistik t .

3.3.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan antara nilai F-tabel dengan F-hitung hasil *run* regresi yang dilakukan. Jika nilai F-tabel < F- hitung maka dapat disimpulkan model dapat diterima dan layak digunakan untuk menjelaskan ETR. Pengaruh yang

signifikan dari variabel independen sebagai faktor yang mempengaruhi nilai ETR harus memiliki nilai signifikansi sebesar $<0,05$ sehingga dapat dilanjutkan dengan pengujian statistik t (Ghozali, 2012).

3.3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Ghozali, 2012).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Dalam kenyataan nilai *adjusted* R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif (Ghozali, 2012). Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2006) jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted* R^2 negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol.

3.3.4.3 Uji t (parsial)

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2012). Apabila t hitung yang diperoleh lebih besar dari t tabel berarti t hitung signifikan yang berarti hipotesis diterima. Sebaliknya apabila t hitung yang diperoleh lebih kecil dari t tabel maka berarti hipotesis ditolak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 (=5%). Penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dilihat dari masing-masing variabel. Apabila nilai $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak dan sebaliknya jika $t < 0,05$ maka hipotesis diterima (Ghozali,2012).

3.3.4.4 Uji Chow Test

Uji ini digunakan untuk melihat perbandingan antara nilai perusahaan tahun 2011 dengan 2012 pada hipotesis 2b. Peningkatan nilai perusahaan antara tahun 2011 dengan tahun 2012 dapat dilihat dengan apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai perusahaan pada periode setelah adanya praktik *tax avoidance* jangka panjang .

Hipotesis dalam pengambilan keputusan ini adalah :

H₀ : Tidak terdapat peningkatan nilai perusahaan antara tahun 2011 dengan tahun 2012 setelah adanya praktik *tax avoidance* jangka panjang.

H_a (H_{2b}) : Terdapat peningkatan nilai perusahaan antara tahun 2011 dengan tahun 2012 setelah adanya praktik *tax avoidance* jangka panjang.

Chow test adalah alat untuk menguji *test for equality of coefficients* atau uji kesamaan koefisien dan uji ini ditemukan oleh Gregory Chow. Uji chow test ini dapat dilakukan dengan rumus (Ghozali, 2012) :

$$F_{\text{hit}} = \frac{(RSS_r - RSS_{\text{ur}})/k}{(RSS_{\text{ur}})/(n_1 + n_2 - 2k)}$$

Keterangan :

RSS_r : *Sum of Squared Residual* untuk regresi dengan total observasi.

RSS_{ur} : Penjumlahan *Sum of Squared Residual* dari masing-masing regresi menurut kelompok.

n : Jumlah observasi ($n_1 + n_2$)

k : Jumlah parameter yang diestimasi pada *restricted regression*.

Selanjutnya hasil dari F_{hitung} ini akan dibandingkan dengan F_{tabel} , jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka hipotesis nol dapat ditolak. Jadii terdapat peningkatan nilai perusahaan antara tahun 2011 dengan tahun 2012 setelah adanya praktik *tax avoidance* jangka panjang. Akan tetapi jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka yang terjadi adalah sebaliknya yaitu hipotesis nol tidak dapat ditolak atau dengan kata lain kita menerima hipotesis nol.